

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Tuanku adalah otoritas keagamaan khas Pariaman. Otoritas ini telah melekat sejak lama dalam sistem sosial masyarakat setempat. Ia dipraktikkan dalam keseharian orang Pariaman sebagai gelar atau sapaan kehormatan, dan juga simbol otoritas spiritual-keagamaan. Realitas ini menurut perspektif Taufik Abdullah (1996) dalam karyanya *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah*, merupakan sebuah proses bagaimana Islam mewujudkan dirinya dalam konteks sosial. Bagi Taufik Abdullah sebagaimana disimpulkan oleh Kuntowijoyo (2025:65), proses sosialisasi atau proses pensejarahan Islam itu adalah keniscayaan sejarah yang bersifat simbolik yang dapat diperiksa melalui struktur budaya yaitu sistem pemikiran, kata-kata, benda-benda dan perilaku konvensional.

Dalam realitas sosialnya, keberadaan Tuanku berakar kuat pada sejarah Islamisasi di pesisir barat Sumatera (Fathurahman, 2008). Figur Tuanku yang kini dikenal masyarakat sesungguhnya merupakan hasil kontinuitas dari perjalanan panjang sejarah keagamaan sejak masa Syekh Burhanuddin (abad ke-17). Hal ini mengesankan bahwa Islam tidak hanya dipahami sebagai ajaran normatif, tetapi juga diwujudkan dalam praktik sosial, ritus, dan sistem nilai yang membentuk identitas keislaman orang Pariaman. Karena itu, Tuanku di masa kini adalah representasi dari proses historis yang menautkan masa lalu dengan kehidupan beragama masa kini.

Dalam lintasan sejarah Minangkabau, Pariaman ditulis dalam literatur sejarah sebagai poros pertemuan antara agama, adat, dan kekuasaan (Kato, 1980). Dari daerah inilah gelar Tuanku menemukan makna yang lebih kompleks dibanding sekadar gelar keagamaan (Chaniago, 2012). Di satu sisi, Tuanku merujuk pada sosok ulama atau guru agama yang memiliki legitimasi spiritual dan moral (Azra, 2023; Azwar et al., 2023); di sisi lain, gelar tersebut mencerminkan sistem penghormatan sosial yang dibentuk oleh jaringan tarekat, relasi murid-guru, dan

nilai-nilai lokal (Azwar et al., 2023; Zakirman, Mahmudi & Bary, 2023). Dalam konteks ini, memahami historiografi Tuanku di masa kini bukan berarti menelusuri asal-usul tokoh-tokoh agama, melainkan juga membaca bagaimana masyarakat menulis, menafsirkan, dan mewariskan makna ke-Tuanku-an sebagai bagian dari konstruksi sosial atas realitas mereka sendiri (Berger & Luckmann, 1966).

Periode awal Tuanku dapat dilacak sejak abad ke-17 (Dobbin, 2008; Samad, 2003). Periode ini merupakan fase penting dalam sejarah pembentukan tradisi keulamaan dan kehidupan religius di Pariaman (Fathurahman, 2008). Masa ini ditandai oleh munculnya sosok Syekh Burhanuddin Ulakan, seorang ulama besar yang secara simbolis dan spiritual menempati posisi sentral dalam sejarah Islamisasi pantai barat Sumatera (Asnan et al., 2019; Azra, 2023). Dalam tradisi lisan masyarakat, ia selalu disebut sebagai *Tuanku nan partamo* atau *asa mulo ba-Tuanku* (Tuanku yang pertama atau asal mula ber-Tuanku), bukan hanya karena peran keagamaannya yang luas (tarekat, dakwah, dan pendidikan), tetapi juga karena kemampuannya mengintegrasikan ajaran Islam dengan tatanan sosial-budaya setempat. Menurut keyakinan Azra (1985) dan Rivauzi (2014), Syekh Burhanuddin adalah murid dari Syekh Abdurrauf as-Singkili, seorang ulama besar dari Aceh yang memperkenalkan tarekat Syattariyah di Nusantara (Van Bruinessen, 1992). Hubungan guru-murid ini menjadi fondasi penting bagi terbentuknya jaringan spiritual yang menghubungkan Aceh dan Minangkabau, dan menandai awal dari sejarah islamisasi yang bercorak tarekat serta berakar kuat dalam sistem sosial masyarakat pesisir (Fathurahman, 2008; Rivauzi, 2014; Samad, 2003).

Kehadiran Syekh Burhanuddin di Ulakan membawa perubahan mendalam terhadap cara masyarakat Pariaman memahami agama dan otoritas. Ia tidak hanya mengajarkan ritual keagamaan, tetapi juga membentuk struktur sosial yang berbasis pada lembaga surau (A. Bakar, 2023). Surau yang awalnya berfungsi sebagai tempat ibadah bersama, kemudian berkembang menjadi pusat pendidikan, tempat musyawarah, sekaligus lembaga transmisi pengetahuan Islam (Dobbin, 2008). Dalam konteks ini, surau berperan sebagai ruang reproduksi nilai dan identitas keislaman lokal, yaitu suatu bentuk institusionalisasi ajaran sufistik yang memadukan antara dimensi spiritual dan sosial. Melalui sistem pendidikan yang

berbasis murid dan guru, Tuanku Burhanuddin berhasil menanamkan nilai-nilai Syattariyah yang menekankan penyucian batin, disiplin moral, dan penghormatan terhadap ilmu. Surau Ulakan pun menjelma menjadi pusat spiritualitas dan sumber legitimasi religius bagi banyak ulama generasi berikutnya, membentuk jaringan Tuanku-Tuanku yang menyebar ke berbagai nagari di Pariaman dan sekitarnya (Sefriyono, 2020; Zakirman, Mahmudi & Bary, 2023).

Dari proses ini, istilah Tuanku mulai mengalami transformasi makna yang mendalam. Awalnya merupakan gelar kehormatan bagi ulama tarekat yang memiliki silsilah keilmuan tertentu (Firdaus, 2014), gelar ini kemudian menjadi simbol relasi sosial dan spiritual antara masyarakat dengan pemimpin moral mereka (Samad, 2003). Sebutan Tuanku tidak hanya menunjukkan otoritas keagamaan, tetapi juga mengandung makna genealogis karena hubungan antara murid dan guru dalam tradisi tarekat sering dipahami sebagai ikatan keluarga spiritual (Rivauzi, 2014). Dalam konteks masyarakat Pariaman, hubungan ini melahirkan struktur kultural yang menempatkan Tuanku sebagai penjaga keseimbangan antara adat dan syara', antara dunia sosial dan dunia spiritual (Samad, 2003). Dengan demikian, periode awal Tuanku bukan hanya fase lahirnya figur religius, melainkan juga fase pembentukan sistem sosial dan simbolik yang akan terus menjadi fondasi bagi konstruksi realitas keagamaan dan kebudayaan orang Pariaman hingga masa-masa berikutnya.

Pada fase kolonial dan masa Revolusi Padri pada abad ke-19, narasi tentang Tuanku mengalami perubahan mendasar dan menjadi bagian dari konflik ideologis besar yang mengubah wajah sosial Minangkabau, termasuk Pariaman (Azwar et al., 2023). Masa ini merupakan titik pertemuan antara ortodoksi agama, politik kekuasaan, dan resistensi terhadap kolonialisme. Menurut Dobbin (1974), gerakan Padri muncul sebagai upaya purifikasi Islam yang terinspirasi oleh ajaran-ajaran reformis di dunia Islam seperti didefinisikan oleh Nahuijs (1827) dan Raffles (1830), termasuk menjustifikasi adanya pengaruh Wahhabisme dari Jazirah Arab (Dobbin, 2008). Namun, dalam konteks lokal, gerakan ini berkembang sebagai respon terhadap praktik adat yang dianggap bertentangan dengan syariat (Hamka, 1982; Latief, 1988). Di sini, istilah Tuanku menjadi medan simbolik di mana

perdebatan tentang otoritas agama dan legitimasi sosial berlangsung secara intens. Para tokoh seperti Tuanku Nan Renceh, Tuanku Imam Bonjol, dan Tuanku Tambusai menjadikan gelar Tuanku bukan sekadar gelar keulamaan, melainkan lambang perjuangan religius sekaligus politik untuk menegakkan tatanan sosial baru yang berlandaskan Islam (Daya, 1990).

Perang Padri (1803–1837) tidak hanya menandai benturan fisik antara kelompok Padri dan kaum adat, tetapi juga memperlihatkan bagaimana wacana tentang Tuanku menjadi alat mobilisasi ideologis. Dalam konteks ini, Tuanku berfungsi sebagai figur yang menghubungkan agama dan perjuangan sosial, di mana otoritas spiritual diterjemahkan ke dalam bentuk perlawanan bersenjata terhadap dominasi kolonial Belanda (Amran, 1997; Dobbin, 1972). Tuanku Imam Bonjol, misalnya, menampilkan dirinya sebagai pemimpin moral sekaligus panglima perang yang menegakkan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* (Dobbin, 1972; Hadler, 2008). Transformasi makna ini memperlihatkan bagaimana gelar Tuanku berubah dari simbol spiritual ke simbol revolusioner. Namun demikian, seperti dicatat Dobbin (1974), gerakan Padri juga mengalami paradoks internal: di satu sisi ingin memurnikan Islam, di sisi lain terjebak dalam dinamika kekuasaan yang kompleks antara kepentingan agama, adat, dan politik kolonial (Amran, 1981a). Akibatnya, istilah Tuanku mulai terpecah menjadi dua wajah; yang satu menegaskan perjuangan teologis, dan yang lain dimanfaatkan sebagai alat legitimasi dalam arena politik lokal.

Pasca-Perang Padri, kolonial Belanda berupaya menata ulang struktur sosial dan religius Minangkabau dengan melakukan kooptasi terhadap figur-figur religius (Hamka, 1982). Strategi ini bertujuan untuk meredam potensi perlawanan yang bersumber dari otoritas keagamaan. Dalam konteks inilah terjadi diferensiasi antara Tuanku surau dan Tuanku penghulu, dua kategori sosial yang mencerminkan kompromi antara *syara'* dan adat. Tuanku surau tetap berperan dalam pendidikan dan spiritualitas Islam lokal, sementara Tuanku penghulu diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan kolonial sebagai bagian dari birokrasi nagari. Proses ini, sebagaimana dijelaskan oleh Daya (Daya, 1990), merupakan bentuk rekonsiliasi paksa yang mengubah karakter sosial gelar Tuanku dari simbol perjuangan menjadi

representasi moral yang lebih jinak secara politik. Meskipun demikian, dalam memori masyarakat Pariaman, Tuanku Padri tetap dikenang sebagai figur heroik yang menegakkan martabat Islam, sementara Tuanku surau mempertahankan warisan spiritual Syekh Burhanuddin menjadikan keduanya dua sisi dari mata uang yang sama dalam sejarah sosial keagamaan Pariaman.

Memasuki fase setelah kemerdekaan (pasca-1945), narasi tentang Tuanku mengalami reposisi dalam konfigurasi sosial-politik Republik Indonesia yang sedang membangun identitas nasional. Periode ini ditandai oleh perubahan besar dalam sistem sosial dan pendidikan Islam di Sumatera Barat, termasuk di Pariaman. Setelah runtuhnya kekuasaan kolonial, ruang keagamaan yang sebelumnya dikontrol oleh sistem birokrasi Belanda beralih menjadi arena baru bagi ulama untuk memperkuat pengaruhnya. Tuanku di Pariaman tidak hanya berperan sebagai pemimpin spiritual, tetapi juga sebagai pendidik dan penggerak sosial. Melalui lembaga-lembaga seperti surau, organisasi tarekat, pondok pesantren dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), mereka membangun jaringan pendidikan Islam yang berorientasi pada moralitas, keilmuan, dan kemandirian sosial (Fathurahman, 2008). Dalam fase ini, Tuanku kembali memegang peranan penting sebagai penjaga nilai-nilai Islam dan penghubung antara masyarakat dengan sistem pendidikan formal yang baru tumbuh di daerah.

Namun, dinamika sosial-politik nasional yang semakin modern turut mengubah lanskap otoritas religius di tingkat lokal. Arus modernisasi pendidikan, urbanisasi, dan munculnya kelas birokrat-religius (Klinken, 2014) dari kalangan santri terdidik membawa tantangan baru bagi posisi Tuanku. Sistem pendidikan Islam modern yang diperkenalkan melalui madrasah negeri dan universitas Islam (Reetz, 2010) menggantikan sebagian fungsi surau tradisional sebagai pusat pengajaran. Akibatnya, Tuanku kehilangan sebagian peran sosialnya sebagai figur sentral dalam transmisi ilmu dan moralitas masyarakat. Meski demikian, mereka tetap mempertahankan eksistensinya dengan menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman. Sebagian Tuanku beralih menjadi pendidik di lembaga formal, sementara yang lain tetap berkiprah di komunitas lokal sebagai pemimpin spiritual dan penggerak moral. Pergeseran ini menandai munculnya diferensiasi baru antara

Tuanku tradisional dan Tuanku modern, dua wajah otoritas keagamaan yang hidup berdampingan di tengah perubahan sosial pasca-kemerdekaan.

Di tingkat lokal, meskipun terdesak dari pusat wacana nasional, Tuanku tetap menjadi simbol legitimasi spiritual yang kuat. Mereka hadir dalam ritual-ritual keagamaan seperti *basapa*, *ratik tagak*, *ratik tolak bala*, (Oktavia et al., 2019) dan berbagai upacara adat yang meneguhkan relasi antara agama, budaya, dan identitas komunitas. Tradisi ziarah ke makam ulama, terutama ke makam Syekh Burhanuddin di Ulakan (Faslah & Khoirul Fata, 2020; Nur & Syafrizal, 2022), menjadi bentuk paling nyata dari keberlanjutan simbolik tersebut. Dalam praktik semacam ini, masyarakat tidak hanya memperingati jasa para Tuanku, tetapi juga meneguhkan memori kolektif mereka tentang kontinuitas spiritualitas Islam local (A. T. Hidayat et al., 2022). Dengan demikian, meskipun negara dan modernitas telah mengubah struktur kekuasaan sosial, Tuanku tetap bertahan dalam ranah kultural dan spiritual — sebagai figur yang menjaga keseimbangan antara sejarah, keagamaan, dan identitas kedaerahan orang Pariaman.

Pada masa Orde Lama dan Orde Baru (1950–1998), narasi tentang Tuanku di Pariaman mengalami transformasi signifikan sebagai bagian dari upaya negara untuk menata ulang hubungan antara agama, politik, dan masyarakat. Negara yang tengah berusaha membangun legitimasi ideologisnya melalui proyek nasionalisme dan pembangunan ekonomi secara sistematis melakukan proses domestikasi terhadap figur-figur religius lokal. Negara secara sistematis mentransformasi narasi Tuanku di Pariaman dengan mendomestikasi otoritas keagamaan lokal melalui mekanisme politik dan ideologis selama era Orde Lama dan Orde Baru. Beberapa literatur menunjukkan adanya upaya negara melemahkan gerakan keagamaan melalui manipulasi dan kebijakan (Hajar & Bakar 2024). Sementara Syafiq Hasyim (2023) menunjukkan adanya kebijakan domestikasi berawal dari perbedaan antara pemerintah dan agama. Zakirman (Zakirman, Mahmudi & Bary, 2023) secara khusus mencatat bahwa Tuanku di Padang Pariaman tetap tangguh meskipun menghadapi tekanan negara, dengan masyarakatnya secara aktif melawan transformasi eksternal. Lebih lanjut, Bouchier (2019) menegaskan bahwa Islam secara sistematis disubordinasikan selama periode ini, dengan negara berusaha

mengendalikan narasi keagamaan melalui integrasi ideologis. Transformasi ini bukanlah penghapusan total, melainkan negosiasi kekuasaan dan otoritas keagamaan yang kompleks.

Dalam konteks ini, ulama yang sebelumnya memiliki otonomi moral dan sosial mulai diarahkan agar berada di bawah kendali birokrasi keagamaan resmi seperti Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia. Kebijakan tersebut merupakan strategi negara untuk menundukkan otoritas moral masyarakat di bawah struktur politik nasional yang berorientasi pada stabilitas dan modernisasi (Kahin, 2005). Akibatnya, ulama atau Tuanku dalam konteks Pariaman kehilangan sebagian peran publiknya sebagai pemimpin komunitas independen dan lebih sering dikategorikan sebagai tokoh agama tradisional yang hanya berfungsi dalam bidang spiritual dan ritual.

Namun, di tingkat masyarakat lokal, posisi Tuanku tidak sepenuhnya hilang. Masyarakat Pariaman tetap mempertahankan penghormatan terhadap mereka sebagai penjaga moralitas kolektif dan simbol kontinuitas tradisi Islam lokal. Dalam kehidupan sehari-hari, Tuanku masih menjadi rujukan utama dalam penyelesaian konflik sosial, penentuan waktu ritual keagamaan, serta legitimasi berbagai upacara adat seperti *baralek* (pesta perkawinan), *batagak penghulu* (pengangkatan penghulu adat), dan *manjapuik marapulai* (menjemput mempelai laki-laki dalam pesat perkawinan). Kehadiran mereka juga penting dalam menentukan makna moral di tengah perubahan sosial akibat urbanisasi dan migrasi besar-besaran pasca-1970-an. Dalam banyak kasus, Tuanku berperan sebagai mediator sosial yang menjaga harmoni antara norma agama dan adat. Dengan demikian, meskipun secara struktural otoritas mereka direduksi, secara kultural Tuanku tetap menjadi figur sentral yang menjaga kesinambungan nilai-nilai spiritual dalam memori kolektif masyarakat Pariaman.

Akan tetapi, proses domestikasi ini memiliki konsekuensi wacana yang cukup dalam. Negara modern, melalui narasi pembangunan dan ideologi stabilitas politik, berusaha merekonstruksi makna Tuanku agar sesuai dengan citra Islam moderat yang apolitis dan terkendali. Dalam kerangka wacana tersebut, Tuanku diposisikan sebagai figur spiritual yang dihormati tetapi tidak berdaya secara

politis. Mereka dijadikan simbol warisan religius dan budaya daerah, bukan lagi agen perubahan sosial yang kritis terhadap kekuasaan. Seperti dicatat oleh Kahin (2005), kebijakan pembangunan Orde Baru menghendaki model keagamaan yang jinak dan mendukung agenda negara, bukan yang menantanginya. Maka, Tuanku di Pariaman menjadi *representasi dari religiusitas yang dilembutkan* (Kahin, 2005), dalam arti dihormati dalam konteks sosial, tetapi dipinggirkan dari wacana politik. Proses ini memperlihatkan bagaimana negara modern mengonstruksi ulang bentuk-bentuk religiusitas tradisional agar sejalan dengan ideologi pembangunan, sekaligus bagaimana masyarakat lokal tetap menyimpan makna asli Tuanku dalam lapisan memori kultural yang lebih dalam.

Dalam fase kontemporer (pasca-Reformasi hingga kini), narasi tentang Tuanku di Pariaman memperlihatkan proses reaktualisasi dan reinterpretasi yang kompleks. Jika pada masa sebelumnya Tuanku lebih sering hadir dalam ruang ritual dan tradisi lisan, kini figur itu memasuki ruang-ruang publik baru, baik melalui forum akademik, kebijakan kebudayaan daerah, maupun praktik keagamaan populer. Salah satu indikasinya adalah kebangkitan minat masyarakat terhadap sejarah lokal dan warisan keagamaan Syekh Burhanuddin Ulakan. Tradisi tahunan Basapa di Ulakan, yang dahulu sempat dianggap kuno oleh generasi muda, kini justru menjadi ajang perayaan identitas keagamaan dan kultural. Dalam momen itu, masyarakat bukan hanya berziarah, tetapi juga mengafirmasi jati diri mereka sebagai urang Pariaman yang memiliki sejarah spiritual sendiri di luar arus dominan Islam reformis atau modernis.

Transformasi ini diperkuat oleh peran media digital sebagai medium baru bagi memori kolektif. Cerita-cerita tentang Tuanku kini direproduksi dalam bentuk konten video dokumenter, unggahan media sosial, bahkan vlog perjalanan spiritual ke Ulakan (Abiy, 2023). Anak muda Pariaman menggunakan bahasa visual untuk menarasikan kembali hubungan mereka dengan figur Tuanku dalam bentuk estetika lokal, musik religius, hingga narasi nostalgia. Dalam ruang digital tersebut, Tuanku tidak lagi tampil sebagai figur sakral yang jauh, tetapi sebagai simbol yang hidup, cair, dan dapat dinegosiasikan dengan nilai-nilai kekinian. Hal ini menunjukkan bagaimana memori budaya tentang Tuanku tidak beku dalam masa lalu, tetapi

senantiasa dihidupkan kembali melalui proses reinterpretasi dan mediasi simbolik baru (Erlil, 2011).

Pada level konseptual, reaktualisasi ini mengubah posisi Tuanku dari sekadar figur keagamaan menjadi locus identitas kultural. Orang Pariaman menempatkan Tuanku sebagai penanda distingtif yang membedakan mereka dari kelompok lain di Minangkabau. Dalam wacana ini, Tuanku bukan hanya guru tarekat atau pewaris ajaran Syekh Burhanuddin, melainkan juga representasi nilai-nilai moral, ketertiban sosial, dan kepariamanan itu sendiri. Ia menjadi simbol memori kolektif yang berfungsi membentuk *collective identity* (J. Assmann, 2011) sekaligus ruang artikulasi makna tentang siapa orang Pariaman di tengah modernitas yang kian mengaburkan batas antara agama dan budaya. Dengan demikian, fase kontemporer ini tidak hanya menandai keberlanjutan tradisi, tetapi juga memperlihatkan bagaimana memori tentang Tuanku terus dinegosiasikan dalam dialektika antara masa lalu dan masa kini.

Dari seluruh fase historis yang telah dijelaskan di atas mulai dari masa Syekh Burhanuddin Ulakan pada abad ke-17 hingga era digital pasca-Reformasi tampak bahwa narasi tentang Tuanku selalu bergerak dalam dialektika antara agama, budaya, dan kekuasaan. Namun, rangkaian periode tersebut belum sepenuhnya mampu menjelaskan bagaimana Tuanku dipahami secara sosiologis oleh orang Pariaman dan bagaimana sebutan itu berkembang menjadi identitas kultural-keagamaan yang khas. Sebab, di balik kronologi peristiwa dan perubahan struktur sosial yang terjadi, terdapat lapisan makna yang lebih dalam: Tuanku bukan hanya kategori historis, tetapi juga bentuk realitas sosial historis yang dikonstruksi (Berger & Luckmann, 1966), yang lahir dari pengalaman keseharian masyarakat dalam menafsirkan otoritas religius dan relasi sosial mereka sendiri. Dengan kata lain, untuk memahami Tuanku di Pariaman tidak cukup melalui pendekatan sejarah kronologis, melainkan juga melalui pembacaan terhadap kesadaran sosial, bahasa simbolik, dan struktur nilai yang membentuknya sebagai realitas intersubjektif.

Fakta sosial yang paling mencolok adalah bahwa di seluruh wilayah Minangkabau, hanya di Pariaman gelar Tuanku memiliki fungsi sosial dan kultural

yang begitu kuat dan hidup hingga kini. Di daerah lain, istilah seperti Buya, Angku, atau Syekh lebih sering digunakan untuk menyebut ulama, sementara di Pariaman, Tuanku telah menjadi sebutan generik bagi otoritas keagamaan yang dihormati masyarakat. Perbedaan ini tidak muncul secara kebetulan, melainkan hasil dari sejarah panjang interaksi antara tarekat Syattariyah, sistem surau, dan jaringan kekerabatan pesisir yang menempatkan hubungan murid–guru sebagai fondasi struktur sosial religius. Dalam pandangan masyarakat, Tuanku tidak hanya menguasai ilmu agama, tetapi juga memiliki karamah moral yang menjadikannya sumber legitimasi sosial, penengah konflik, dan penjaga keseimbangan antara adat dan syara'. Ia menjadi figur *didahulukan selangkah-ditinggikan saantiang*, (ditinggikan tetapi tidak menjauh) dalam arti pemimpin spiritual yang sekaligus bagian dari komunitas sosial yang ia layani.

Oleh karena itu, Tuanku di Pariaman hari ini bukan sekadar warisan historis, melainkan juga simbol identitas kolektif yang mengikat masyarakat pada akar budaya dan spiritualitas mereka. Ia hidup dalam bahasa, ritual, dan memori kolektif yang terus diperbarui dari generasi ke generasi. Dalam konteks inilah, Tuanku berfungsi sebagai penanda identitas kultural-keagamaan yang membedakan orang Pariaman dari kelompok Minangkabau lainnya. Gelar ini menandai keunikan cara masyarakat memahami hubungan antara kekuasaan spiritual dan tatanan sosial, di mana agama tidak berdiri di atas budaya, tetapi berjaln erat di dalamnya. Dengan demikian, studi tentang Tuanku bukan hanya persoalan sejarah ulama, melainkan upaya memahami bagaimana masyarakat Pariaman menegosiasikan makna religiusitas dalam kerangka memori budaya dan konstruksi sosial atas realitas mereka sendiri sebagai sebuah proses sejarah yang terus berlangsung hingga hari ini.

Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan metodologi sejarah yang menekankan pentingnya dimensi sosial, simbolik, dan naratif dalam memahami peristiwa masa lalu (Burke, 2001; White, 1987). Dalam tradisi sejarah kultural dan sejarah kehidupan sehari-hari (*Alltagsgeschichte*), sebagaimana diperkenalkan oleh Alf Lüdtke (1995) dan Carlo Ginzburg (1992), fokus penelitian tidak lagi terbatas pada struktur makro dan tokoh besar, tetapi pada bagaimana makna historis

dibentuk melalui praktik sosial dan pengalaman kolektif masyarakat. Dengan demikian, pendekatan terhadap “Tuanku” dalam penelitian ini bukanlah pencarian kronologi peristiwa, melainkan upaya memahami bagaimana realitas sejarah itu dihidupi, diingat, dan dinegosiasikan oleh masyarakat Pariaman.

Secara historiografis, setiap periode tersebut menampilkan pola yang berbeda dalam cara Tuanku ditulis dan dipahami. Dalam narasi awal, Tuanku direpresentasikan melalui kisah karomah, sanad keilmuan, dan relasi spiritual dengan Aceh; pada masa kolonial, ia menjadi simbol perjuangan dan resistensi; setelah kemerdekaan, ia berfungsi sebagai pemelihara moral sosial; sementara di masa kontemporer, ia menjadi simbol kultural yang menghubungkan sejarah, agama, dan identitas. Dengan demikian, historiografi Tuanku di Pariaman bukanlah cerita tunggal, melainkan kumpulan representasi sosial yang saling bertemu dan bertentangan dalam konteks sejarah yang berbeda-beda. Di sinilah letak pentingnya membaca Tuanku melalui pendekatan sejarah kehidupan sehari-hari untuk menangkap bagaimana makna itu hidup dalam bahasa, ritual, dan kebiasaan masyarakat yang terus menafsir ulang sejarah mereka sendiri.

Lebih jauh lagi, pendekatan ini membuka jalan bagi analisis wacana sosial sebagaimana dikembangkan oleh Marc Angenot (1991) untuk memahami bagaimana masyarakat Pariaman berbicara tentang Tuanku, apa topoi dan paradigma tematik yang digunakan, serta bagaimana wacana tersebut merefleksikan relasi kuasa di dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya menulis ulang sejarah, tetapi juga menelusuri logika sosial di balik bagaimana sejarah itu dituturkan. Pada titik ini, teori konstruksi sosial atas realitas dari Berger dan Luckmann (P. L. Berger & Luckmann, 1967) berperan penting, karena mengajarkan bahwa realitas sosial —*termasuk sejarah dan religiusitas*— dibentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Sementara itu, teori memori kolektif Maurice Halbwachs (1950) membantu menjelaskan bagaimana pengalaman sejarah tentang Tuanku disimpan, diulang, dan dimaknai ulang oleh generasi ke generasi.

Dalam konteks metodologi sejarah, penelitian ini memadukan tiga prinsip utama: pertama, prinsip contextuality sebagaimana dikemukakan oleh E. H. Carr

(1969) bahwa setiap fakta sejarah harus dibaca dalam konteks sosialnya; kedua, prinsip *interpretative understanding* (Weber, 2011) yang menekankan makna subjektif tindakan sosial; dan ketiga, prinsip *narrative construction* sebagaimana dijelaskan Hayden White (2014), bahwa sejarah selalu disampaikan dalam bentuk narasi yang membawa muatan ideologis dan moral tertentu. Ketiga prinsip ini menjadi dasar dalam membaca Tuanku sebagai konstruksi historis yang tidak hanya hidup dalam arsip, tetapi juga dalam memori dan wacana sosial masyarakat.

Dengan memadukan ketiga pendekatan tersebut (yaitu: *historiografi kehidupan sehari-hari, analisis wacana sosial, dan konstruksi sosial atas realitas*) penelitian ini bertujuan menghasilkan pemahaman yang lebih utuh tentang bagaimana Tuanku hidup dalam ingatan kolektif Orang Pariaman. Melalui pendekatan ini, Tuanku tidak lagi dipandang sebagai entitas historis yang beku, melainkan sebagai simbol yang terus bergerak dalam sejarah, senantiasa dinegosiasikan, dan terus membentuk cara masyarakat memahami diri mereka di tengah perubahan zaman.

Untuk melangkah lebih jauh dari sekadar pemaparan kronologi sejarah, diperlukan pendekatan yang mampu membaca Tuanku bukan hanya sebagai figur masa lalu, tetapi sebagai wacana sosial yang hidup dalam kehidupan sehari-hari orang Pariaman masa kini. Historiografi tentang Tuanku selama ini cenderung berpusat pada narasi ulama besar, peristiwa tarekat, atau dinamika keagamaan formal. Padahal, dalam keseharian masyarakat, makna Tuanku terus bertransformasi melalui bahasa, ritual, dan praktik sosial yang berlangsung di ruang domestik, di surau, bahkan di ruang digital. Dengan demikian, analisis historiografis terhadap Tuanku perlu diarahkan pada cara masyarakat memaknai dan menuturkan kembali kisah-kisah ke-Tuanku-an mereka sendiri, yaitu suatu bentuk sejarah yang tidak hanya ditulis dalam teks akademik, tetapi juga dalam tutur, ziarah, dan kebiasaan sosial yang mereproduksi makna secara terus-menerus.

Pendekatan yang paling relevan untuk membaca fenomena ini adalah analisis wacana sosial (*social discourse analysis*), sebagaimana dikembangkan oleh Marc Angenot (Angenot, 1991, 2004a) dan sejalan dengan kerangka *the social construction of reality* dari Berger dan Luckmann (1966). Melalui pendekatan ini,

Tuanku dipahami sebagai hasil dari *proses dialektis antara bahasa, tindakan sosial, dan struktur kesadaran kolektif*. Wacana tentang Tuanku di ruang publik Pariaman, baik dalam percakapan sehari-hari, khutbah, upacara adat, hingga media sosial, merupakan bentuk artikulasi makna yang memperlihatkan bagaimana masyarakat menegosiasikan posisi religius dan kultural mereka di tengah perubahan sosial yang cepat. Ketika orang Pariaman menyebut seseorang “*Tuanku urang kampuang awak juo*,” pernyataan itu tidak sekadar pengakuan terhadap ilmu agama seseorang, melainkan ekspresi identitas sosial yang mengandung memori, afeksi, dan klaim legitimasi kultural. Di sinilah analisis wacana sosial berperan: untuk menyingkap logika sosial, nilai-nilai tersembunyi, serta relasi kekuasaan yang terselubung di balik bahasa keseharian tentang Tuanku.

Dalam konteks fase kontemporer, proses sejarah di Pariaman bergerak melalui konstruksi sosial atas realitas yang berlangsung di ruang interaksi sehari-hari. Tuanku tidak lagi hanya hadir dalam bentuk figur ulama karismatik, tetapi juga sebagai memori simbolik yang mempersatukan komunitas melalui peringatan *Basapa* di Ulakan, ritual *ratik tolak bala*, atau kisah-kisah digital tentang karamah dan silsilah keilmuan. Realitas ini menunjukkan bahwa masyarakat Pariaman membangun dan memelihara makna Tuanku secara aktif, melalui proses eksternalisasi (penciptaan makna lewat praktik sosial), objektivasi (pelembagaan dalam bentuk tradisi dan bahasa), dan internalisasi (penyerapan makna ke dalam kesadaran individu). Hasil dari proses dialektis ini adalah terbentuknya ingatan kolektif (Halbwachs, 1950, 1992b) yang menjadikan Tuanku bukan sekadar masa lalu yang diingat, melainkan bagian dari kehidupan yang dijalani. Dengan demikian, memahami Tuanku hari ini berarti memahami bagaimana orang Pariaman membentuk identitas mereka melalui ingatan sosial; sebuah memori yang tidak hanya mengenang sejarah, tetapi juga terus menegosiasikan makna religiusitas dan kebudayaan dalam dunia modern yang terus berubah.

Untuk memahami bagaimana Tuanku hidup dalam kesadaran sosial orang Pariaman masa kini, diperlukan pendekatan analisis berlapis yang mampu menjembatani antara sejarah, wacana, dan pengalaman sosial. Historiografi klasik memang telah memberikan fondasi yang kuat tentang asal-usul Tuanku, terutama

melalui kajian tokoh-tokoh besar seperti Syekh Burhanuddin Ulakan, Tuanku Imam Bonjol, atau jaringan surau yang berkembang sejak abad ke-17. Namun, seperti telah dijelaskan pada fase-fase sebelumnya, jejak sejarah ini hanya mencerminkan satu sisi dari realitas sosial: sisi yang tertulis, terekam, dan dilembagakan dalam teks akademik. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh, perlu dilakukan pembacaan yang menembus lapisan formal historiografi menuju dimensi sosial di mana Tuanku terus direproduksi dalam bahasa, praktik, dan memori masyarakat. Keempat lapisan tersebut antara lain:

- (1) Lapisan pertama dari analisis ini adalah bagaimana Tuanku dinarasikan dalam literatur sejarah. Kajian ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana konstruksi akademik tentang Tuanku dibangun oleh peneliti dan sejarawan sebelumnya. Dalam historiografi kolonial maupun pasca-kolonial, Tuanku kerap diposisikan sebagai aktor keagamaan yang berperan dalam islamisasi atau perlawanan terhadap kolonialisme (Azra, 2004; Azra et al., 2010; Daya, 1990; Dobbin, 2008). Akan tetapi, narasi tersebut umumnya menempatkan Tuanku dalam kerangka besar sejarah politik dan agama, bukan sebagai bagian dari pengalaman sosial sehari-hari masyarakat Pariaman. Dengan menelusuri bagaimana teks-teks akademik mendefinisikan dan mengatur makna Tuanku, analisis ini dapat mengungkap bias wacana, paradigma ilmiah, serta ideologi pengetahuan yang membentuk pemahaman publik tentang figur tersebut. Di sini, Tuanku bukan sekadar objek penelitian, tetapi juga hasil dari konstruksi epistemologis yang perlu dikritisi secara reflektif.
- (2) Lapisan kedua adalah bagaimana Tuanku diwacanakan dalam kehidupan sehari-hari orang Pariaman kontemporer. Di luar teks sejarah, Tuanku hidup dalam bahasa dan tindakan sosial masyarakat: dalam cara orang menyebut nama mereka, mempraktikkan ajaran mereka, dan menempatkan mereka dalam narasi moral keseharian. Analisis wacana sosial Angenot (Angenot, 1991) dapat digunakan untuk membaca bagaimana bahasa keseharian memproduksi legitimasi dan identitas. Ketika masyarakat Pariaman berkata, "*Tuanku nan kini indak samo jo nan dahulu*," kalimat itu merefleksikan perubahan struktur makna yang kompleks antara nostalgia, kritik sosial, dan pembentukan nilai

baru. Wacana ini menunjukkan bagaimana masyarakat tidak hanya mengenang Tuanku, tetapi juga menegosiasikan kembali peran mereka dalam konteks modernitas, birokratisasi agama, dan ekspansi media digital. Dengan demikian, lapisan ini memungkinkan pembacaan terhadap Tuanku sebagai fenomena bahasa yang menyeberangi ranah sakral dan profan.

- (3) Lapisan ketiga berfokus pada bagaimana proses sejarah itu terbentuk dan berlangsung dalam keseharian orang Pariaman. Di sini, sejarah sehari-hari (*Alltagsgeschichte*) menjadi konsep kunci, karena ia memungkinkan untuk melihat bagaimana struktur besar sejarah seperti islamisasi, kolonialisme, nasionalisme dan otonomi daerah dihidupi dan dimaknai melalui tindakan kecil, ritual, dan ingatan sosial di tingkat lokal. Misalnya, tradisi *Basapa* di Ulakan bukan sekadar ritual tahunan, melainkan bentuk konkret dari dialektika antara masa lalu dan masa kini. Melalui ziarah, doa, dan simbol-simbol tertentu, masyarakat secara tidak sadar mereproduksi versi mereka sendiri tentang sejarah Syekh Burhanuddin dan Tuanku lain yang mereka kenal melalui cerita keluarga. Proses ini adalah bentuk internalisasi sejarah, di mana peristiwa masa lalu tidak lagi menjadi fakta eksternal, melainkan bagian dari kesadaran sosial yang hidup dan berubah mengikuti konteks zamannya (Berger & Luckmann, 1966).
- (4) Lapisan keempat, yang menjadi sintesis konseptual dari seluruh analisis adalah bagaimana ingatan kolektif tentang Tuanku membentuk kesadaran historis dan identitas kultural orang Pariaman. Di titik ini, penelitian tidak lagi sekadar menggambarkan sejarah Tuanku sebagai deretan peristiwa, melainkan menelusuri bagaimana memori tentang Tuanku berfungsi sebagai modal simbolik yang meneguhkan identitas komunal. Mengikuti pandangan Halbwachs (Halbwachs, 1992b) dan Assmann (J. Assmann, 2011), ingatan kolektif adalah mekanisme sosial di mana masyarakat mengorganisasi masa lalunya untuk menjelaskan masa kini. Dalam konteks Pariaman, Tuanku menjadi semacam tempat ingatan (*lieu de mémoire*) yang menampung nilai-nilai spiritual, moral, dan budaya. Ketika masyarakat menuturkan kisah tentang *Tuanku nan pertama sakali* atau berziarah ke makam Syekh Burhanuddin,

mereka tidak hanya mengingat, tetapi juga membangun kesadaran historis yang memperkuat kontinuitas identitas mereka sebagai orang Pariaman. Dengan demikian, memahami Tuanku berarti memahami cara masyarakat membangun dunia sosialnya melalui ingatan tentang masa lalu, tetapi juga terus diperbarui dalam keseharian.

Dengan demikian, studi ini berangkat dari semangat sejarah sehari-hari (*Alltagsgeschichte*), yakni pendekatan yang menempatkan pengalaman, praktik, dan narasi masyarakat biasa sebagai pusat pemaknaan sejarah. Fokusnya bukan semata pada peristiwa besar atau tokoh monumental, melainkan pada bagaimana figur seperti Tuanku hidup dalam ingatan, bahasa, dan tindakan sosial orang Pariaman masa kini. *Melalui cara pandang ini, sejarah tidak lagi dilihat sebagai sesuatu yang jauh dan beku dalam arsip, melainkan sebagai realitas yang terus dinegosiasikan dalam keseharian; dalam tutur cerita, dalam ritual keagamaan, dalam media digital, bahkan dalam cara masyarakat menafsir ulang tradisi.* Pendekatan sejarah sehari-hari memungkinkan peneliti membaca lapisan-lapisan halus di mana konstruksi sosial atas realitas, wacana, dan ingatan kolektif bertemu, sehingga makna Tuanku sebagai simbol kultural dan spiritual dapat dipahami tidak hanya secara historis, tetapi juga secara hidup dan dialogis dalam konteks sosial kontemporer Pariaman.

1.2. Masalah Penelitian

Penelitian ini berpijak pada asumsi dasar bahwa figur Tuanku di Pariaman tidak semata merupakan bagian dari sejarah keagamaan Minangkabau, tetapi merupakan hasil dari proses konstruksi sosial yang panjang dan terus hidup dalam ingatan kolektif masyarakat. Dalam lintasan waktu yang membentang sejak abad ke-17 ketika Syekh Burhanuddin Ulakan memperkenalkan Islam dengan corak tarekat Syattariyah hingga memasuki era digital kontemporer, makna Tuanku senantiasa dinegosiasikan melalui bahasa, ritual, praktik sosial, dan narasi budaya yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Pariaman. Dengan demikian, figur Tuanku tidak hanya hadir dalam teks-teks sejarah atau dokumen keagamaan, melainkan juga dalam cara masyarakat mengalami, menuturkan, dan mewariskan makna tentang dirinya sendiri.

Secara teoretis, penelitian ini berlandaskan pada pemikiran Peter L. Berger dan Thomas Luckmann (P. L. Berger & Luckmann, 1967) dalam buku *The Social Construction of Reality*, yang menjelaskan bahwa realitas sosial terbentuk melalui proses dialektis antara individu dan masyarakat, yaitu melalui eksternalisasi pengalaman, objektivasi makna, dan internalisasi ke dalam kesadaran kolektif. Dalam kerangka ini, Tuanku dipahami sebagai hasil dari proses sosial yang dinamis, yang maknanya tidak berhenti pada masa lalu, tetapi terus dikonstruksi ulang dalam konteks keseharian masyarakat Pariaman. Oleh karena itu, memahami figur Tuanku berarti membaca cara masyarakat Pariaman mengonstruksi sejarah dan identitasnya sendiri melalui praktik sosial yang berlangsung secara berkelanjutan. Penelitian ini dengan demikian menempatkan diri dalam tradisi sejarah kehidupan sehari-hari (*Alltagsgeschichte*), yakni sebuah pendekatan yang menempatkan pengalaman keseharian masyarakat sebagai locus utama pembentukan kesadaran historis (Lüdtke, 1995; P. Thompson & Bornath, 2017).

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan utama “bagaimana Tuanku dikonstruksi dalam ingatan kolektif orang Pariaman melalui pengalaman sejarah dan praktik kehidupan sehari-hari mereka?” Pertanyaan utama tersebut dijabarkan ke dalam beberapa rumusan turunan yang saling berhubungan dan membentuk analisis berlapis, sebagai berikut:

1. Bagaimana figur Tuanku dinarasikan dalam historiografi dan literatur sejarah Minangkabau-Pariaman, serta bagaimana periodisasi maknanya terbentuk dari masa ke masa?
2. Bagaimana Tuanku diwacanakan dan dimaknai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Pariaman kontemporer?
3. Bagaimana proses sejarah dan konstruksi sosial atas realitas Tuanku berlangsung dalam jaringan interaksi sosial, lembaga surau, serta hubungan kekerabatan masyarakat Pariaman?
4. Bagaimana ingatan kolektif orang Pariaman membentuk, memelihara, dan menegosiasikan figur Tuanku sebagai bagian dari identitas kultural dan kesadaran historis mereka dalam konteks kehidupan sehari-hari?

Pertanyaan pertama diarahkan untuk menelusuri konstruksi wacana historis tentang Tuanku sebagaimana tercermin dalam teks-teks klasik, sumber kolonial, maupun kajian akademik modern, guna memahami perubahan makna dan posisi simbolik Tuanku dalam narasi sejarah. Pertanyaan kedua berfokus pada dimensi praksis, yaitu bagaimana masyarakat menghidupkan kembali figur Tuanku melalui tutur budaya, ritual keagamaan, dan representasi digital, serta bagaimana wacana-wacana tersebut merefleksikan bentuk keberagamaan dan identitas kultural mereka hari ini. Sedangkan pertanyaan ketiga digunakan untuk menelusuri dinamika dialektis antara struktur sosial dan agensi masyarakat dalam mempertahankan kesinambungan makna Tuanku sebagai figur religius dan kultural di tingkat lokal. Pertanyaan keempat menjadi sintesis konseptual yang menempatkan memori kolektif sebagai ruang di mana sejarah, wacana, dan pengalaman sosial bertemu, serta menjadi mekanisme kultural yang menjaga kontinuitas makna ke-Tuanku-an di tengah perubahan zaman.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan diri sebagai kajian sejarah paralel yang berupaya mempertemukan dua dimensi historisitas: sejarah struktural yang direkonstruksi melalui literatur dan historiografi, serta sejarah kultural yang dihidupi masyarakat Pariaman dalam realitas keseharian masa kini. Sejarah struktural menghadirkan kerangka institusional dan kronologi perubahan sosial yang membentuk figur Tuanku sejak masa Syekh Burhanuddin hingga transformasinya dalam sistem sosial Minangkabau, sedangkan sejarah kultural menyingkap bagaimana makna Tuanku terus dinegosiasikan dalam bahasa, ritual, dan praktik hidup masyarakat sekarang, sehingga sejarah tidak berhenti sebagai teks, melainkan menjelma menjadi pengalaman sosial yang terus diperbarui.

Dengan memadukan kedua aras tersebut di atas, penelitian ini menolak pemisahan antara masa lalu dan masa kini secara dikotomis, karena realitas historis dan realitas sosial saling menembus melalui mekanisme ingatan kolektif dan konstruksi sosial atas realitas.

Dalam kerangka di atas, Tuanku dipahami bukan hanya sebagai figur religius dalam sejarah Islamisasi Minangkabau, melainkan juga sebagai representasi kultural yang terus dikonstruksi dalam kesadaran masyarakat

Pariaman. Melalui analisis wacana sosial dan teori konstruksi sosial atas realitas, penelitian ini berupaya menyingkap bagaimana masyarakat membentuk dan mereproduksi pengetahuan sejarah mereka sendiri melalui praktik, bahasa, dan memori. Dengan cara itu, sejarah Tuanku tidak semata menjadi objek kajian masa lampau, melainkan menjadi medan refleksi tempat masyarakat memahami diri, ruang sosial, dan kontinuitas masa lalunya dalam kehidupan sehari-hari.

1.3. Batasan Penelitian

Dalam rangka menjaga fokus analisis dan ketepatan interpretasi, penelitian ini menetapkan sejumlah batasan agar kajian terhadap figur Tuanku di Pariaman tetap berada dalam koridor tematik, ruang, dan waktu yang relevan dengan tujuan penelitian. Penetapan batasan ini penting untuk menghindari keluasan bahasan yang berlebihan serta memastikan bahwa analisis berpusat pada konteks sosial-historis yang membentuk makna Tuanku. Oleh karena itu, penelitian ini dibingkai dalam tiga batas utama, yakni batasan tematik, batasan spasial, dan batasan temporal, yang akan dijelaskan secara berurutan berikut ini.

1.3.1. Batasan Tematik

Penelitian ini secara tematik berfokus pada konstruksi figur Tuanku dalam ingatan kolektif orang Pariaman kontemporer. Fokus kajian diarahkan pada bagaimana makna, peran, dan otoritas Tuanku hidup dan direproduksi dalam pengalaman sehari-hari masyarakat, baik melalui bahasa, narasi, ritual, maupun praktik sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak menelaah aspek-aspek teologis atau doktrinal Islam secara mendalam, tetapi menyoroti bagaimana dimensi keseharian dan budaya berperan dalam membentuk, menegosiasikan, dan melestarikan memori sosial tentang Tuanku. Pendekatan *Alltagsgeschichte* atau sejarah sehari-hari digunakan untuk memahami Tuanku bukan hanya sebagai figur keagamaan, tetapi sebagai fenomena sosial-historis yang terus hadir dan dimaknai ulang dalam kehidupan masyarakat Pariaman masa kini.

Secara lebih lugas, penelitian ini ingin melihat bagaimana masyarakat Pariaman sekarang memahami dan mengingat Tuanku dalam kehidupan mereka sehari-hari lewat percakapan, kebiasaan, upacara adat, dan cara mereka memberi makna pada peristiwa sosial. Dengan cara ini, Tuanku dipahami sebagai bagian dari

dinamika sosial yang hidup, bukan sosok yang beku dalam sejarah. Pendekatan ini membantu menjelaskan bahwa ingatan kolektif tentang Tuanku tidak hanya diwariskan dari masa lalu, tetapi juga terus dibentuk oleh cara orang-orang sekarang berbicara, bertindak, dan berinteraksi dalam keseharian mereka.

1.3.2. Batasan Spasial

Secara spasial, penelitian ini dibatasi pada wilayah kultural Pariaman pesisir barat Sumatera Barat sebagai pusat awal penyebaran Islam Syattariyah dan tradisi ke-Tuanku-an. Pariaman dipilih karena memiliki kekhasan tersendiri dalam mempertahankan istilah Tuanku sebagai simbol otoritas religius dan sosial yang hidup hingga masa kini, berbeda dari wilayah Minangkabau lainnya yang lebih sering menggunakan gelar seperti Buya atau Syekh. Dalam konteks ini, ruang geografis Pariaman bukan hanya lokasi penelitian, tetapi juga ruang kultural dan historis di mana konstruksi sosial atas figur Tuanku terbentuk dan direproduksi.

Dalam konteks ini, ruang geografis Pariaman bukan hanya lokasi penelitian, tetapi juga ruang kultural dan historis di mana konstruksi sosial atas figur Tuanku terbentuk dan direproduksi. Sebagai ruang kultural, Pariaman menjadi medan simbolik tempat nilai, norma, dan praktik keagamaan dilembagakan melalui tradisi, bahasa, dan relasi sosial. Merujuk pada pandangan Assmann (J. Assmann, 2011) bahwa ruang budaya memori adalah wadah simbolik tempat masyarakat menyimpan, mentransmisikan, dan memperbarui makna kolektifnya dalam proses yang terus berlangsung. Dengan demikian, keberadaan Tuanku menjadi bagian dari sistem makna yang hidup dan berkelanjutan dalam memori masyarakat Pariaman. Sementara itu, sebagai ruang historis, Pariaman mengandung lapisan pengalaman masa lalu yang terus diaktifkan kembali oleh orang-orang di masa sekarang, seperti dinyatakan oleh Pierre Nora (1989); ruang historis adalah arena di mana memori kolektif terikat pada situs, praktik, dan simbol yang menjadikan sejarah hadir secara sosial di masa kini.

1.3.3. Batasan Temporal

Secara temporal, penelitian ini mencakup rentang waktu dari abad ke-17 hingga era kontemporer (pasca-Reformasi), dengan fokus utama pada periode pasca-kemerdekaan hingga era digital yang didefinisikan sebagai periode

kontemporer. Pemilihan rentang waktu ini didasarkan pada asumsi bahwa sejarah panjang figur Tuanku tidak berhenti pada fase Islamisasi awal, melainkan terus mengalami transformasi makna seiring perubahan sosial, politik, dan teknologi. Periode modern dan kontemporer menjadi penting untuk melihat proses reaktualisasi dan reinterpretasi makna Tuanku dalam konteks modernitas, birokratisasi agama, serta ekspresi identitas lokal di era media digital.

Dalam penelitian ini, kontemporer dipahami bukan sekadar penanda periode waktu mutakhir, tetapi sebagai *regime of temporality* di mana masa lalu terus dinegosiasikan melalui kerangka sosial masa kini. Hal ini sejalan dengan pandangan Hartog (2015) bahwa era kontemporer ditandai oleh presentism, yaitu dominasi perspektif masa kini sebagai lensa utama memahami masa lalu dan membayangkan masa depan. Dengan demikian, kontemporer bukan waktu yang statis, tetapi ruang temporal dinamis di mana memori, identitas, dan otoritas keagamaan diproduksi ulang secara berkelanjutan. Pandangan ini juga sejalan dengan Halbwachs (1992b), yang menegaskan bahwa memori kolektif selalu “dibentuk kembali dalam kerangka sosial saat ini,” serta Assmann (2011) yang menyebut bahwa masa kini memiliki peran aktif dalam memilih, mempertahankan, atau mengabaikan elemen-elemen masa lalu demi kebutuhan identitas kontemporer. Dengan demikian, era kontemporer adalah waktu sejarah yang tidak hanya menunjuk pada masa kini secara kronologis, tetapi merupakan rezim temporal (Hartog, 2015) di mana masa lalu secara aktif dinegosiasikan, dipilih, dan diproduksi ulang untuk memenuhi kebutuhan identitas, otoritas, dan orientasi sosial masyarakat masa kini (Fedorova, 2023).

Dalam konteks ini, pembacaan atas figur Tuanku pada era kontemporer bertumpu pada asumsi bahwa memori tentang Tuanku tidak hanya bersifat *retrospektif*, tetapi juga *prospektif* yang membentuk orientasi moral, otoritas sosial, dan praktik keberagamaan masyarakat Pariaman di tengah arus globalisasi dan digitalisasi. Dengan demikian, batasan temporal ini memungkinkan penelitian untuk menangkap dinamika historis sekaligus kinerja ingatan yang bekerja dalam konfigurasi sosial-budaya Pariaman masa kini.

1.4. Posisi dan Signifikansi Penelitian ini dalam Studi Sejarah

Penelitian ini menempatkan diri dalam tradisi sejarah kultural yang berorientasi pada pengalaman makna dan kesadaran kolektif masyarakat terhadap masa lalunya. Dalam konteks tersebut, pendekatan terhadap figur Tuanku tidak semata menelusuri kronologi peristiwa, tetapi juga berupaya memahami bagaimana memori dan simbol-simbol keagamaan direproduksi dalam kehidupan sosial masyarakat Pariaman. Dengan demikian, penelitian ini berposisi di antara dua arus besar historiografi: di satu sisi berakar pada sejarah struktural yang mengkaji relasi institusional dan kekuasaan keagamaan (Kuntowijoyo, 2025); di sisi lain, beririsan dengan sejarah mentalitas yang menelaah pandangan hidup, keyakinan, dan bentuk kesadaran kolektif masyarakat (Tumblety, 2013). Posisi ini memungkinkan peneliti untuk melihat sejarah Tuanku bukan hanya sebagai entitas masa lampau, melainkan sebagai konstruksi sosial yang terus bertransformasi dan menjadi bagian dari living history masyarakat Pariaman.

Penelitian ini penting dilakukan untuk menjembatani antara kajian sejarah empiris dan pendekatan teoritik tentang memori budaya (Kuntowijoyo, 2025), dan akan berkontribusi pada pengayaan metodologi sejarah yang juga memperhitungkan dimensi pengalaman kolektif, simbolik, dan naratif dalam pembentukan realitas historis. Secara akademik, penelitian ini memperluas horizon kajian sejarah lokal menuju perspektif interdisipliner yang menggabungkan teori konstruksi sosial (Berger & Luckmann) dan studi memori budaya (Halbwachs dan Assmann). Sementara secara sosial, penelitian ini penting untuk memahami bagaimana otoritas keagamaan lokal seperti Tuanku berperan dalam mempertahankan identitas religius, mengelola dinamika modernitas, serta menjadi sumber legitimasi moral bagi masyarakat Pariaman hingga masa kini.